

PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NEGARA DAN RELEVANSINYA DENGAN KONDISI SAAT INI

Disampaikan Pada Kediatan Workshop Pengembangan Bahan Ajar PKn dan Penyusunan Dokumen II
KTSP MGMP PKn SMP Kabupaten Kulon Progo Semester Gasal Tahun 2011/2012.

Cholisin, Dosen Jurusan PKn & Hukum FISE UNY

I. PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NEGARA

Pengertian ideologi, yaitu keseluruhan pandangan cita-cita, nilai dan keyakinan yang ingin diwujudkan dalam kenyataan hidup yang konkrit (Soerjanto Poespowardojo, 1991:44). Dengan demikian ideologi diyakini mampu memberikan semangat dan arahan yang positif, bagi kehidupan masyarakat untuk berjuang melawan berbagai penderitaan, kemiskinan dan kebodohan. Dengan pemahaman yang baik mengenai ideologi, maka seseorang dapat menangkap apa yang dilihat benar dan tidak benar, serta apa yang dinilai baik dan tidak baik.

Misalnya, dalam ideologi Pancasila nilai kekeluargaan atau kebersamaan yang diutamakan, maka seorang yang memahami dengan baik nilai kekeluargaan akan menolak nilai individualisme karena nilai ini melahirkan liberalisme, kapitalisme, kolonialisme, imperilaisme, monopoli, otoriterianisme dan totaliterisme. Dalam kaitan ini Bung Hatta dalam “Kearah Indonesia Merdeka” menyatakan bahwa “Kedaulatan Rakyat Barat” didasarkan pada pendapat J.J.Rousseau yaitu individualisme, sedangkan Kedaulatan Indonesia adalah “rasa bersama”, *kolektiviteit*. Dengan memahami ideologi Pancasila juga dapat untuk menilai misalnya, bahwa kejujuran sesuatu yang baik karena sesuai dengan nilai kemanusiaan dan sebaliknya berbuat curang, menipu sesuatu yang tidak baik, karena bertentangan dengan nilai kemanusiaan.

Ideologi negara merupakan perkembangan dari ideologi bangsa. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) (1991:163), menyatakan Pancasila sebagai **ideologi bangsa** artinya setiap warga negara Republik Indonesia terikat oleh ketentuan-ketentuan yang sangat mendasar yang tertuang dalam sila yang lima. Kadang-kadang kedua istilah tersebut, disatukan menjadi **Pancasila sebagai Ideologi Bangsa dan Negara Indonesia** (Kaelan, 2010: 30-31). Pancasila sebagai Ideologi Bangsa dan Negara Indonesia dimaksudkan bahwa Pancasila pada hakikatnya **bukan hanya** merupakan suatu hasil perenungan atau pemikiran seseorang atau kelompok orang sebagaimana ideologi –ideologi lain di dunia, namun Pancasila diangkat dari nilai-nilai adat-istiadat, nilai-nilai kebudayaan serta nilai-nilai relegius yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia sebelum membentuk negara. Dengan perkataan lain unsur-unsur yang merupakan materi (bahan) Pancasila tidak lain diangkat dari pandangan hidup masyarakat Indonesia sendiri, sehingga bangsa ini merupakan kausa materialis (asala bahan) Pancasila. Unsur-unsur Pancasila tersebut kemudian diangkat dan dirumuskan oleh para pendiri negara. Sehingga Pancasila berkedudukan sebagai dasar negara dan ideologi bangsa dan negara Indonesia.

Pembukaan UUD 1945, menyatakan bahwa Pancasila adalah dasar negara. Dengan demikian Pancasila merupakan nilai dasar yang normatif terhadap seluruh penyelenggaraan negara Republik Indonesia. Dengan kata lain Pancasila merupakan **Dasar Falsafah Negara atau Ideologi Negara**, karena memuat norma-norma yang paling mendasar untuk mengukur dan menentukan keabsahan bentuk-bentuk penyelenggaraan negara serta kebijaksanaan-

kebijaksanaan penting yang diambil dalam proses pemerintahan (Soerjanto Poespowardojo, 1991:44). Pancasila sebagai ideologi negara berarti Pancasila merupakan ajaran, doktrin, teori dan/atau ilmu tentang cita-cita (ide) bangsa Indonesia yang diyakini kebenarannya, disusun secara sistematis serta diberi petunjuk dengan pelaksanaan yang jelas.

Abdurrahman Wahid (1991:163) menyatakan Pancasila sebagai **falsafah negara** berstatus sebagai kerangka berpikir yang harus diikuti dalam menyusun undang-undang dan produk hukum yang lain, dalam merumuskan kebijakan pemerintah dan dalam mengatur hubungan formal antar lembaga-lembaga dan perorangan yang hidup dalam kawasan negara ini. Sedangkan **Pancasila sebagai dasar negara Indonesia** (Kaelan, 2010 :40-41) memiliki konsekuensi segala peraturan perundang-undangan dijabarkan dari nilai-nilai Pancasila. Dengan lain perkataan Pancasila merupakan sumber hukum dasar Indonesia, sehingga seluruh peraturan hukum positif Indonesia diderivasikan atau dijabarkan dari nilai-nilai Pancasila.

Kemudian Pancasila sebagai dasar kehidupan kebangsaan dan kenegaraan adalah merupakan **Identitas Nasional Indonesia** (Kaelan, 2010 :39). Maksudnya bahwa asal nilai (kausa materialis) Pancasila adalah bangsa Indonesia sendiri. Konsekuensinya ciri khas sifat, serta karakter bangsa Indonesia tercermin dalam sistem nilai filsafat Pancasila. Sebagai sistem nilai, maka susunan Pancasila (1) bersifat hierarkhis dan berbentuk Piramidal, (2) bersifat saling mengisi dan saling mengkualifikasi (Kaelan, 2010 :10-12).

Susunan hierarkhis dan berbentuk piramidal, intinya bahwa urutan lima sila menunjukkan suatu rangkaian tingkat dalam luasnya dan isi-sifatnya, merupakan pengkhususan dari sila-sila yang dimukanya. Dalam susunan hierarkhis dan berbentuk piramidal, maka Ketuhanan yang Maha Esa menjadi basis kemanusiaan, persatuan Indonesia, kerakyatan dan keadilan sosial. Sebaliknya Ketuhanan yang Maha Esa adalah Ketuhanan yang berkemanusiaan, yang membangun, memelihara dan mengembangkan persatuan Indonesia, yang berkerakyatan dan berkeadilan sosial, demikian selanjutnya, sehingga tiap-tiap sila di dalamnya mengandung sila-sila yang lain. Kemudian susunan Pancasila dalam hierarkhis pyramidal dapat dirumuskan dalam hubungannya saling mengisi dan saling mengkualifikasi. Tiap-tiap sila mengandung empat sila lainnya, dikualifikasi oleh empat sila lainnya. Rumusnya sebagai berikut:

1. Sila pertama : Ketuhanan Yang Maha Esa adalah Ketuhanan yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berpersatuan Indonesia, yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
2. Sila kedua : Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah kemanusiaan yang berketuhanan Yang Maha Esa, yang berpersatuan Indonesia, yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
3. Sila ketiga : Persatuan Indonesia adalah persatuan yang berketuhanan Yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
4. Sila keempat : Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan adalah kerakyatan berketuhanan Yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berpersatuan Indonesia yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
5. Sila kelima : Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia adalah keadilan yang berketuhanan Yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang

berpersatuan Indonesia, yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

Perumusan di atas urut-urutannya merupakan suatu kesatuan keseluruhan yang bulat. Jika urutannya tidak demikian yakni terpecah-pecah dan tidak ada ada sangkut paut antara sila yang satu dengan yang lainnya, maka sesungguhnya tidak ada Pancasila, sehingga tidak dapat dipergunakan sebagai asas kerokhanian bagi negara.

II. PERMASALAHAN BANGSA DEWASA INI

Salahsatu masalah terbesar bangsa ini adalah masalah identitas nasional atau karakter bangsa. Dalam pertimbangan tentang perlunya kebijakan nasional pembangunan karakter bangsa didasarkan adanya permasalahan yang sedang dihadapi bangsa saat ini yaitu : (1) disorientasi dan belum dihayatinya nilai-nilai Pancasila sebagai filosofi dan ideologi bangsa. (2) Keterbatasan perangkat kebijakan terpadu dalam mewujudkan nilai-nilai esensi Pancasila. (3) Bergesernya nilai-nilai etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (4) Memudarnya kesadaran terhadap nilai-nilai budaya bangsa. (5) Ancaman disintegrasi bangsa. (6) Melemahnya kemandirian bangsa. Dengan kata lain seperti dikatakan Gumilar Rusliwa Somantri, kita sedang tengah mengalami anomie atau “kekosongan” *Grundnorm* yang menjadi rujukan berdirinya negara bangsa yang tunggal dan sumber dari berbagai tata aturan. Anomie terjadi karena Pancasila yang sejak kemerdekaan menjadi norma dasar, ikut terpuruk bersama jatuhnya rezim Orde Baru.

Masalah di atas, tampaknya merupakan persoalan lama yang belum terpecahkan. Koentjaraningrat (1974) dalam *Kebudayaan, Mentalitet dan Pembangunan*, menyatakan sedikitnya ada lima mentalitas negatif bangsa Indonesia: (1) meremehkan mutu; (2) cenderung mencari jalan pintas (menerabas) (misalnya. : main belakang, orang dalam, semua bisa diatur, satu meja satu amplop, urusan diselesaikan dengan damai,pen.); (3) tidak percaya diri; (4) tidak berdisiplin (misalnya.: jam karet, vonis dapat ditentukan di belakang meja, membuang sampah sembarangan, lebih takut kepada polisi daripada kepada peraturan, terlambat dalam mengerjakan banyak hal, tawuran, sidang pleno di DPR tak pernah lengkap,pen.); dan (5) mengabaikan tanggung jawab (misalnya. : tidak amanah, khianat, korupsi massal, penyalahgunaan kekuasaan,pen.). Sedangkan Muchtar Lubis (1986) menyatakan bahwa ciri negatif manusia Indonesia: (1) hipokritis alias munafik; (2) segan dan enggan bertanggung jawab; (3) berjiwa feodal; (4) masih percaya takhyul; (5) artistik; (6) memiliki watak yang lemah; (7) bukan *economic animal*;

Belum terpecahkannya masalah karakter, menjadikan Indonesia belum beranjak mencapai kemajuan yang mensejahterakan rakyat. Sebagai bangsa yang pernah dijajah negara kapitalis – imperialis yang menindas dan menyengsarakan justru Indonesia tidak mampu keluar dari sistem ekonomi kapitalis yang tidak berkeadilan ini . Bangsa Indonesia dipaksa untuk memenuhi tiga syarat ekonomi guna memperoleh pengakuan kedaulatan dalam forum KMB pada 1949. Ketiga syarat ekonomi itu adalah: (1) bersedia menerima warisan utang Hindia Belanda sebesar 4,3 miliar gulden; (2) bersedia mematuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh IMF; dan (3) bersedia mempertahankan keberadaan perusahaan-perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia. (Revrisond Baswir.2009). Ekonomi Pancasila (Ekonomi Kerakyatan) yang memiliki komitmen kuat untuk mewujudkan keadilan sosial yang secara tegas ditentukan pasal 33 UUD 1945, justru tidak dijalankan. Ini menunjukkan adanya krisis kepercayaan diri, kemandirian dan nasionalisme yang sangat rendah. Kesalahan inilah yang dapat menjerumuskan Indonesia, seperti yang ditakutkan Sukarno, “*menjadi bangsa kuli dan kuli di*

antara bangsa-bangsa.” Bahkan, mungkin yang lebih buruk lagi dari kekuatiran Sukarno, “*menjadi bangsa pengemis dan pengemis di antara bangsa-bangsa*”. Otho H. Hadi (2011) menyatakan Hubungan Indonesia dengan organisasi donor (IMF, CGI, World Bank, ADB) dan negara-negara pemberi pinjaman (AS, Jepang, EU), sudah mendekati hubungan antara “pengemis-pemberi sedekah.” Sikap dan perilaku demikian ini sangat bertentangan dengan gagasan dasar berdirinya Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Sikap ketergantungan yang terus-menerus atas bantuan asing (*foreign assistance*) sangat bertentangan dengan konsep awal “*nation and character building*”. ISSP (International Social Survey Programme) yang berbasis di Norwegia pada tahun 1995 (melibatkan 23 negara) dan 2003 (melibatkan 34 negara) menunjukkan terdapat korelasi positif antara semangat kebangsaan dan tingkat kemakmuran sebuah bangsa.

Sistem ekonomi kapitalis (neo-liberalisme) memberikan lahan yang subur bagi berkembangnya pragmatisme, individualisme dan materialisme. Hal ini berdampak pada berkembangnya sikap dan perilaku politik transaksional dan kartel. Sikap dan perilaku politik yang demikian, politik dijadikan komoditas untuk memperoleh keuntungan kekuasaan dan material yang sebesar-besarnya bagi diri dan kelompoknya. Kemudian ketika ada penyimpangan yang dilakukan diantara mereka, diatasi dengan cara saling menutupi.

Sesungguhnya kita dalam kondisi krisis ekonomi dan politik, karena berbagai kebijakan publik yang ada belum memberikan tanda-tanda memprioritaskan untuk mewujudkan kesejahteraan yang lebih merata. Misalnya, hal ini dapat digambarkan hal-hal berikut:

1. Proses transisi mennggambarkan semakin terperosok perekonomian Indonesia ke dalam penyelenggaraan agenda-agenda ekonomi neoliberal dalam beberapa waktu belakangan ini. Bahkan, utang dalam dan luar negeri pemerintah yang pada akhir pemerintahan Soeharto berjumlah US\$54 milyar, belakangan membengkak menjadi US\$165 milyar. 230 Juta penduduk hanya menikmati 5% dari pendapatan nasional bruto. Sedangkan 40 orang terkaya di Indonesia menguasai 60% pendapatan nasional bruto (Kompas, 15 Desember 2010).
2. Yang paling menderita dari gejolak harga komoditas adalah penduduk miskin karena bobot harga komoditas mencapai 74 % dalam perhitungan garis kemiskinan (Faisal Basri, Harga Komoditas dan Inflasi, Kompas, 10 Januari 2011, p.15). Klaim angka kemiskinan pemerintahan SBY 31 juta. Hendri Saparini, membuat perhitungan demikian, jika digunakan penduduk yang layak menerima raskin tahun 2010 jumlahnya 70 juta orang. Apabila digunakan yang berhak menerima Jamkesmas jumlahnya 76, 4 juta orang. Sedangkan data Bank Dunia mendekati 100 juta orang (42%) (Hendri Saparini, Si Miskin Harus Bekerja, Kompas, 10 Jan 2011).
3. Angka kelahiran yang sangat tinggi, setiap tahun ada sekitar 4,5 juta bayi lahir. Ini membutuhkan kerja keras bangsa ini menyediakan kebutuhan dasarnya (pangan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan).

III. PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NEGARA DAN RELEVANSINYA DENGAN MASALAH BANGSA

Ada kecenderungan Pancasila sebagai ideologi negara belum serius dimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini dapat digambarkan dari berbagai pandangan berikut ini.

1. Adanya kecenderungan Pancasila dicampakan oleh elit negara

Yudi Latief (2011) “ Jangan Jadikan Pancasila Mitos”, menyatakan " Pancasila sebagai pandangan hidup selama ini telah dicampakan oleh elit negara dan tidak lagi menjadi dasar

dalam mengambil kebijakan. "Ada ketidak konsistenan, para elit selalu mengumbar kata pancasila sementara kebijakannya tidak berdasarkan falsafah Pancasila,". Ia mencontohkan kebijakan ekonomi yang seharusnya sesuai konstitusi dan Pancasila, namun semakin lama justru semakin melenceng. "Pelaksanaan pasal 33 yang seharusnya menjadikan sumber daya alam sebagai alat untuk mewujudkan keadilan sosial, namun justru kini dikuasai asing,". Ia menengarai sekitar 75 kebijakan dan undang-undang yang telah dikeluarkan pemerintah justru bertentangan dengan konstitusi. Ia menambahkan, Pancasila sebagai falsafah bernegara, berbangsa dan bermasyarakat tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama. "Bahkan cocok dengan nilai-nilai agama, karena memang digali dari kehidupan masyarakat Indonesia yang beragama,"

2. Pejabat sudah “alergi” Pancasila
Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Prof Syafii Maarif (2011) menilai pejabat sekarang sudah "alergi" Pancasila, padahal mereka seharusnya menjadi teladan tentang penghayatan dan pengamalan Pancasila yang benar. "Buktinya, pejabat sekarang jarang bicara Pancasila, karena mereka 'alergi'. Itu karena Pancasila memang pernah ada selama 20 tahun, namun Pancasila dijadikan alat pembenar kekuasaan," katanya di Surabaya, Selasa. Di sela-sela Kongres III Pancasila di Auditorium Garunda Mukti Kantor Manajemen Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, ia menyarankan pejabat sekarang untuk meniru Bung Hatta yang melakukan internalisasi Pancasila. "Artinya, jangan seperti dulu, Pancasila jangan berhenti pada kognitif, apalagi diperalat, sehingga Pancasila disalahgunakan dan akhirnya dijauhi. Pancasila harus ada dalam diri kita, lalu amalkan dan beri contoh, jangan justru memeralat Pancasila," katanya.

3. Munculnya ideologi ‘tandingan’ Pancasila
Asvi Marwan Adam (2011) dalam “Mutlak, Hanya Satu Asas Pancasila”, menyatakan munculnya gerakan Negara Islam Indonesia (NII) yang memiliki ideologi berseberangan dengan Pancasila merupakan ancaman serius bagi keberadaan Negara Indonesia. Ini harus menjadi perhatian pemerintah. Sudah menjadi harga mati dan tidak dapat ditawar bahwa Pancasila merupakan asas tunggal yang berlaku di negara ini. Tergerusnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam diri masyarakat Indonesia pun semakin terlihat jelas. Termasuk, yang ditunjukkan oleh para pejabat negara maupun elite politik negeri ini. Di satu sisi, dalam masa keterbukaan sekarang, sangat memungkinkan masuknya pengaruh beragam 'ideologi baru'. Namun, nyatanya kondisi itu tidak diimbangi adanya landasan yang kuat lewat penanaman nilai-nilai Pancasila, terutama dalam jiwa generasi muda. Ini dapat diterapkan melalui pengajaran Pendidikan Pancasila dalam kurikulum pendidikan di Indonesia.

Pancasila sebagai ideologi negara masih sangat mampu untuk mengatasi masalah bangsa dewasa ini. Untuk itu perlu dilakukan antara lain:

1. Pengembangan politik kenegaraan untuk menjaga keutuhan dan keberlangsungan bangsa.

Yudi Latif (2011) dalam “Menghidupkan Pancasila” menyatakan bahwa Indonesia lebih merupakan *state-nation* ketimbang *nation-state*. Bangsa Indonesia dipersatukan bukan karena kesamaan budaya, agama, dan etnisitas, melainkan karena adanya negara persatuan, yang menampung cita-cita politik bersama, mengatasi segala paham golongan dan perseorangan.

Jika negara merupakan faktor pemersatu bangsa, negara pula yang menjadi faktor pemecah belah bangsa. Dengan demikian, lebih dari negara mana pun di muka bumi ini, politik kenegaraan bagi Indonesia sangatlah vital untuk menjaga keutuhan dan keberlangsungan bangsa. Arsitektur politik kenegaraan yang secara tepat guna sanggup mempertahankan kemajemukan Indonesia sebagai *nations-in-nation* adalah desain negara kekeluargaan.

Secara bertepatan, pendiri bangsa, dengan keragaman garis ideologisnya, memiliki pertautan dalam idealisasi terhadap nilai kekeluargaan. Dengan demikian, semangat gotong royong merupakan cetakan dasar (*archetype*) dan karakter ideal keindonesiaan. Ia bukan saja dasar statis yang mempersatukan, melainkan juga dasar dinamis yang menuntun ke arah mana bangsa ini harus berjalan. Dalam istilah Soekarno, kekeluargaan adalah "meja statis" dan "*leitstar* dinamis" yang mempersatukan dan memandukan. Karena kekeluargaan merupakan jantung keindonesiaan, kehilangan semangat kekeluargaan dalam kehidupan kenegaraan dan kebangsaan Indonesia merupakan kehilangan segala-galanya. Kehilangan yang membuat biduk kebangsaan limbung, terombang-ambing gelombang perubahan tanpa jangkar dan arah tujuan. Jika demokrasi Indonesia kian diragukan kemaslahatannya, tak lain karena perkembangan demokrasi itu cenderung tercerabut dari jiwa kekeluargaan. Peraturan daerah berbasis eksklusivisme keagamaan bersitumbuh menikam jiwa ketuhanan yang berkebudayaan. Lembaga-lembaga finansial dan korporasi internasional dibiarkan mengintervensi perundang-undangan dengan mengorbankan kemanusiaan yang adil dan beradab.

Tribalisme, nepotisme, dan pemujaan putra daerah yang menguat dalam pemilu kepala daerah melemahkan persatuan kebangsaan. Anggota parlemen bergotong royong menjarah keuangan rakyat, memperjuangkan "dana aspirasi" seraya mengabaikan aspirasi rakyat, melupakan kegotongroyongan berdasarkan hikmah kebijaksanaan. Ekspansi neoliberalisme, kesenjangan sosial, dan tindak korupsi melebar, menjegal keadilan sosial.

Demokrasi yang dijalankan justru memutar jarum jam ke belakang, membawa kembali rakyat pada periode prapolitik, ketika terkungkung dalam hukum besi sejarah *survival of the fittest* dan *idol of the tribe*. Ada jarak yang lebar antara *voices* dan *choices*, antara apa yang diargumentasikan dengan pilihan institusi dan kebijakan yang diambil. Demokrasi yang diidealkan sebagai wahana untuk memperjuangkan kesetaraan dan persaudaraan lewat pengorganisasian kepentingan kolektif justru menjadi instrumen bagi kepentingan privat. Demokrasi yang dikembangkan tanpa mempertimbangkan sistem pencernaan kebudayaan dan karakter keindonesiaan seperti biduk yang limbung. Dalam satu dekade terakhir, kita seakan-akan telah mengalami begitu banyak perubahan. Namun perubahan yang terjadi tidak membawa kita ke mana pun.

Ibarat pohon, sejarah perkembangan bangsa yang sehat tidak bisa tercerabut dari tanah dan akar kesejarahannya, ekosistem sosial-budaya, sistem pemaknaan, dan pandangan dunianya tersendiri. Pancasila dirumuskan oleh pendiri bangsa sebagai dasar dan tuntutan bernegara dengan mempertimbangkan aspek-aspek itu, lewat usaha penggalan, penyerapan, kontekstualisasi, rasionalisasi, dan aktualisasinya dalam rangka menopang keberlangsungan dan kejayaan bangsa. Dapat dikatakan bahwa sebagian besar ketidakmampuan kita memecahkan masalah hari ini disebabkan ketidakmampuan kita merawat warisan terbaik dari masa lalu. Adapun warisan termahal para pendiri bangsa yang merosot pada saat ini adalah karakter. Karena itu, marilah kita hidupkan kembali karakter Pancasila, sebagai jalan kemaslahatan dan kemajuan Indonesia!

Dalam Konteks ini, Habibie (Mantan Presiden RI) dalam Peringatan Lahirnya Pancasila 1 Juni 1945 (Kompas 3 Juni 2011) menyatakan "Tak kalah penting adalah peran para penyelenggara negara dan pemerintahan untuk secara cerdas dan konsekuen serta konsisten menjabarkan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kebijakan yang dirumuskan

dan program yang dilaksanakan. Untuk sila kelima Pancasila yaitu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, implementasinya yang dilakukan, antara lain, dengan meningkatkan kesempatan kerja bagi rakyat atau mengupayakan kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Pancasila itu bukan untuk disakralkan.

2. Mengembangkan muatan Pancasila dalam sistem pendidikan nasional
Wakil Ketua MPR H Lukman Hakim Saefuddin mendukung keinginan revisi UU Sisdiknas, karena Mendiknas memang harus memberikan muatan nilai-nilai Pancasila dalam sistem pendidikan nasional. Syafii Maarif (2011) tokoh yang dikenal sebagai "Bapak Bangsa" mendukung revisi UU 20/2003 tentang Sisdiknas karena hilangnya muatan Pancasila dalam sistem pendidikan nasional. Karena UU Sisdiknas memang harus mengenalkan Pancasila secara benar, tapi revisi UU Sisdiknas itu harus diiringi dengan penyiapan sumberdaya manusia atau tenaga pendidik yang Pancasila-lis dan patut diteladani".

3. Pembentukan badan khusus perumusan dan pembudayaan Pancasila
MPR, menurut Wakil Ketua MPR H Lukman Hakim Saefuddin mengusulkan kepada pemerintah membentuk badan atau komisi khusus yang tugasnya antara lain merumuskan pengenalan Pancasila secara benar di dunia pendidikan, politik, kemasyarakatan, dan seterusnya,". Badan atau komisi khusus itu nantinya akan merumuskan cara-cara pembudayaan Pancasila yang bukan lagi indoktrinasi, pemaksaan, atau tafsir tunggal, namun melalui cara-cara dialogis. "Misalnya, cara teater untuk pengenalan Pancasila kepada pelajar sekolah menengah atau cara-cara lain yang bukan seperti penataran P4 di masa lalu, sebab bangsa Indonesia yang majemuk sangat membutuhkan Pancasila,". Badan atau komisi khusus itu ada hingga ke tingkat desa atau kelurahan, karena pembudayaan Pancasila memang harus sampai ke lapisan masyarakat di tingkat bawah. "Demokrasi yang sangat liberal seperti yang kita alami sekarang harus dikembalikan kepada Pancasila yakni demokrasi yang mengutamakan unsur musyawarah atau perwakilan dalam permusyawaratan,".

Bacaan:

Abdurahman Wahid.1991. Pancasila Sebagai Ideologi dalam Kaitannya Dengan Kehidupan Beragama dan Berkepercayaan Terhadap Tuhan YME, dalam Alfian & Oetojo Oesman, eds. 1991. *Pancasila Sebagai Ideologi Dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara*, Jakarta : BP-7 Pusat.

Asvi Marwan Adam .2011. "Mutlak, Hanya Satu Asas Pancasila", Copy Right ©2000 Suara Karya Online Powered by [Hanoman-i](#) - Sabtu, 11 Juni 2011

Gumilar Rusliwa Somantri,2006. Pancasila dalam Perubahan Sosial-Politik Indonesia Modern, *dalam Restorasi Pancasila : Mendamaikan politik Identitas dan Modernitas*, Prosiding Simposium Peringatan Hari Lahirnya Pancasila, Kampus FISIP UI, Depok 31 Mei 2006, halaman 34.

Kebijakan Nasional Pembangunan Karakter Bangsa Tahun 2010 – 2025, Pemerintah Republik Indonesia, 2010, halaman v.

Kaelan.2010. PKn, Yogyakarta : Paradigma.

Maarif: Pejabat Sudah "Alergi" Pancasila , posted Jodhi Yudono | Rabu, 1 Juni 2011 | 03:34 WIB

Revrisond Baswir.2009, Ekonomi Kerakyatan Vs Neoliberalisme, Yogyakarta : Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM.

Soerjanto Poespowardojo.1991. Pancasila Sebagai Ideology Ditinjau Dari Segi Pandangan Hisup Bersama, dalam Alfian & Oetojo Oesman, eds. 1991. *Pancasila Sebagai Ideologi Dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara*, Jakarta : BP-7 Pusat.

Otho H. Hadi, MA (Staf Direktorat Politik, Komunikasi, dan Informasi Bappenas). *Nation and Character Building* Melalui Pemahaman Wawasan Kebangsaan. Tulisan ini disusun dari hasil diskusi reguler Direktorat Politik, Komunikasi, dan Informasi Bappenas-red., www.gogle.com/otto-2000910150958/ diunduh, 10 Januari 2011, halaman 2-3

Yudi Latif (2011) Menghidupkan Pancasila , <http://www.gatra.com/artikel.php?id=148905>, Wednesday, June 08, 2011

Yudi Latief: Jangan Jadikan Pancasila Mitos
Kamis, 9 Juni 2011 | 16:06 Copyright ©2011 **Investor Daily**, All Rights Reserved